

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan

Gunanta Ginting ^{1*}; Aos Kuswandi ²; Ayuning Budiati ³

¹ Sekolah Pascasarjana, Universitas Terbuka, Palangka Raya, Indonesia; gunantaginting957@gmail.com

² Universitas Islam 45, Bekasi, Indonesia; koeswandi.all@gmail.com

³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bandung, Indonesia; ayoekomara@gmail.com

*Correspondence : gunantaginting957@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat Desa Kandui dalam perencanaan pembangunan desa telah terlaksana dengan baik setiap tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang menggunakan metode penelitian kualitatif dan peneliti terlibat secara langsung sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat Desa Kandui sebagai informan. Analisis data dilakukan dengan metode yang dikembangkan Miles dan Huberman dengan tiga proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah baik namun terdapat kendala karena rendahnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Kata kunci

Partisipasi, Perencanaan, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

The participation of the Kandui village community in village development planning has been carried out well every year. The purpose of this study was to determine how community participation in development planning, what factors influence community participation and how the level of community participation. This study was conducted in Kandui Village, Gunung Timang District using qualitative research methods and researchers were directly involved so that researchers could make direct observations. Data collection was carried out through interviews with the Kandui Village community as informants. Data analysis was carried out using the method developed by Miles and Huberman with three interrelated processes, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that community participation in development planning is good but there are obstacles due to low public awareness and low levels of community education.

Keywords

Participation, Planning, Village Development.

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, desa menjadi ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Wasdi, 2022 ; Hariyoko, 2022; Kartika, 2012; Marlita & Widodo, 2020; Pamungkas, 2021)

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan desa (Achadiat et al., 2024 ; Dini & Firdaus, 2024). Mekanisme partisipatif ini mengubah paradigma dari sistem top-down yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat menjadi pendekatan bottom-up yang lebih inklusif. Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa menjadi forum utama dalam mengidentifikasi permasalahan dan menentukan prioritas pembangunan desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lestari & Wahyuningsih, 2021; Modanggu, et al., 2023).

Namun, dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, partisipasi masyarakat masih minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta hambatan seperti waktu pelaksanaan musyawarah yang tidak sesuai dengan aktivitas utama masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Faktor lain yang menghambat partisipasi adalah tingkat pendidikan yang masih rendah dan keterbatasan akses informasi mengenai proses perencanaan desa. Akibatnya, kebijakan pembangunan desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terjadi pemborosan anggaran, dan hasil pembangunan kurang termanfaatkan secara optimal.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan didefinisikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pembangunan, baik melalui pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, maupun materi (Sumaryadi, 2010). Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan pembangunan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Dwiningrum (2011) membagi partisipasi masyarakat dalam empat kategori, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Sementara itu, Abe (2002) menambahkan bahwa partisipasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkat, mulai dari partisipasi informasi hingga partisipasi pengelolaan.

Dalam konteks perencanaan, Fayol dalam Siagian (2011) menyatakan bahwa perencanaan adalah fungsi manajemen yang menentukan arah organisasi serta merumuskan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Higgins dalam Hafid Setiadi (2014) menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya. Perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan melibatkan unsur masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020.

Berbagai penelitian telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Meka & Mellita (2022) menekankan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Wahyudin et al. (2020) mengidentifikasi dua bentuk partisipasi utama, yaitu partisipasi langsung dalam pelaksanaan pembangunan dan partisipasi tidak langsung dalam pengambilan keputusan serta evaluasi. Endrawati & Pramudianti (2020) menyoroti pentingnya transparansi anggaran desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Walean et al. (2021) menekankan peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan anggaran desa.

Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek anggaran dan akuntabilitas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa secara lebih menyeluruh di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat mempengaruhi keseluruhan proses perencanaan pembangunan, termasuk implementasi, pengawasan, dan evaluasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa di Desa Kandui. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas perencanaan pembangunan desa, khususnya di Desa Kandui, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam proses pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa di Kecamatan Gunung Timang. Studi kasus dipilih karena

memungkinkan pengumpulan data melalui berbagai teknik dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2010). Studi kasus juga merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara dengan informan kunci. Informan dalam penelitian ini meliputi masyarakat Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, petani, pengusaha, dan lembaga kemasyarakatan desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, berita acara musyawarah desa, serta hasil observasi yang mendukung analisis penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara serta dokumen-dokumen pendukung, seperti berita acara musyawarah desa, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa perencanaan, hingga musyawarah perencanaan pembangunan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan berdasarkan perspektif mereka.

Analisis data dilakukan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh; (2) penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah interpretasi; dan (3) pengambilan kesimpulan atau verifikasi, yang bertujuan untuk menemukan pola dan makna dari data yang telah dikumpulkan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, dan hasil observasi. Selain itu, triangulasi juga dilakukan dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap topik yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipercaya dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang.

Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat desa Kandui dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui forum musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang semua tahapannya dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setiap peserta musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan pendapat tentang rencana kerja pemerintah desa yang telah disusun.

Seperti wawancara dengan tokoh masyarakat Kandui menyampaikan sebagai berikut:

“Saya selalu diundang dalam rapat Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya dan kepada seluruh peserta rapat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya” (Hasil wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh data bahwa dalam pelaksanaan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa Kandui, diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa kandui dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan berdasarkan usulan dari masyarakat dan penetapan prioritas usulan bersama dengan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat RT VI yang menyampaikan sebagai berikut:

“Kami telah diundang oleh kepala desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sehingga kami dari RT VI bisa menyampaikan kebutuhan prioritas kami karena di tahun ini RT VI tidak masuk prioritas karena keterbatasan anggaran. Dan kami berharap di tahun 2025 usulan kami dari RT VI bisa direalisasikan” (Hasil Wawancara, 2024).

Pernyataan masyarakat di atas diperoleh data bahwa ada keberlanjutan dari usulan masyarakat pada tahun sebelumnya yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan akan dianggarkan untuk tahun berikutnya. Pelaksanaan program usulan masyarakat yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dari pernyataan masyarakat di atas diperoleh data bahwa dalam perencanaan pembangunan desa Kandui telah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa perencanaan pembangunan merupakan wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Kandui.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Walean (2021) bahwa dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah desa. Dalam setiap tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa memperhatikan aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan dan saran.

2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

a. Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam perencanaan pembangunan desa masih rendah, terbukti dari tingkat kehadiran yang rendah dalam forum musyawarah. seperti pada wawancara dengan warga RT VII, salah satu responden mengaku tidak hadir dalam rapat karena menganggap itu tanggung jawab Ketua RT:

"Saya tidak hadir saat musdes karena ada pekerjaan biarlah RT saja yang menghadirinya karena itu tanggung jawab mereka untuk melaksanakannya. Ketua RT pasti tahu tentang masalah dan kebutuhan masyarakatnya" (Hasil Wawancara, 2024).

Kondisi ini sejalan dengan temuan Mansuri & Rao (2013), yang menyebutkan bahwa ketidakpercayaan terhadap efektivitas partisipasi dapat menghambat keikutsertaan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran, diperlukan kampanye edukasi tentang manfaat partisipasi (World Bank, 2006).

b. Kemampuan dan Sumber Daya Masyarakat

Keterampilan teknis dan akses ekonomi juga memengaruhi partisipasi. Wawancara dengan seorang masyarakat desa menunjukkan bahwa keterbatasan dana menjadi hambatan dalam mengusulkan proyek infrastruktur:

"Kami mau membangun jalan akses ke sawah, tapi dana dari desa tidak cukup. Akhirnya kami hanya bisa mengusulkan, tapi belum terealisasi" (Hasil Wawancara, 2024).

Informasi lain diberikan oleh Ketua RT VII bahwa:

"Warga saya banyak yang tidak paham tentang perencanaan desa karena pendidikan rendah. Mereka lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari, seperti makan dan sekolah anak" (Hasil Wawancara, 2024).

Keterbatasan kemampuan ekonomi menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur, seperti yang diungkapkan petani di atas. Fenomena ini konsisten dengan temuan Mansuri & Rao (2013), yang mengemukakan bahwa ketidakpercayaan terhadap efektivitas partisipasi dapat menurunkan tingkat keikutsertaan masyarakat. Rendahnya kesadaran ini menimbulkan konsekuensi kurang optimalnya input masyarakat dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat, perlu diupayakan kampanye edukasi tentang manfaat partisipasi aktif (World Bank, 2006).

Kehadiran dalam forum musyawarah seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kewajiban formal, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang diteorikan oleh Pretty (1995), di mana partisipasi yang bermakna menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Temuan ini memperkuat model "ladder of citizen participation" dari Arnstein (1969), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat bisa berada di tingkat tokenism jika masyarakat hanya sekadar hadir tanpa memiliki pengaruh nyata. Dalam kasus Desa Kandui, rendahnya kehadiran masyarakat bahkan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi dari tahap tokenism menuju citizen power. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.

Studi ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Suharto (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat berbanding lurus dengan keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan desa. Pendidikan literasi sipil, pelatihan kepemimpinan komunitas, serta forum diskusi rutin di tingkat RT/RW menjadi langkah konkret yang direkomendasikan.

Sebagai implikasinya, program pembangunan desa harus mengintegrasikan komponen peningkatan kesadaran masyarakat sebagai bagian integral dari setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tidak hanya itu, peraturan-peraturan desa sebaiknya juga mencantumkan ketentuan tentang kewajiban sosialisasi aktif kepada masyarakat untuk setiap program pembangunan baru. Dengan demikian, penguatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat bukan hanya upaya teknis, melainkan strategi transformasional untuk mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

c. Keterbukaan dan Transparansi Pemerintah

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Kandui tidak terdapat sarana informasi yang digunakan untuk membagikan informasi kepada masyarakat. Desa Kandui juga belum memiliki website maupun akun sosial sebagai media berbagi informasi secara online kepada masyarakat. Berdasarkan penelusuran di internet terdapat akun media sosial *facebook* atas nama pemerintah desa namun bukan official pemerintah desa kandui. Akun media sosial tersebut dikelola oleh salah satu perangkat desa kandui namun terakhir aktif pada tahun 2022.

Keterbukaan informasi masih menjadi kendala utama. Wawancara dengan tokoh masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan terhadap minimnya akses informasi:

"Kami sering tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat karena tidak ada pengumuman resmi. Hanya ketua RT yang meneruskan informasi secara lisan" (Hasil Wawancara, 2024).

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap informasi publik, yang pada akhirnya membatasi kesempatan masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam perencanaan pembangunan. Kurangnya keterbukaan informasi tidak hanya menghambat arus komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga menimbulkan potensi ketidakpercayaan dan apatisme warga terhadap proses pembangunan.

Temuan di Desa Kandui ini konsisten dengan laporan World Bank (2006), yang menegaskan bahwa transparansi adalah kunci keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal. Ketidakterediaan informasi yang memadai membuat masyarakat kurang memahami proses pembangunan dan merasa terpinggirkan dari pengambilan keputusan. Pretty (1995) juga menyatakan bahwa pemberian informasi secara aktif kepada masyarakat merupakan bentuk dasar dari partisipasi yang bermakna, yang memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya mengetahui tetapi juga berkontribusi dalam setiap tahap pembangunan.

Dalam konteks teori partisipasi, model "informing" dari Pretty (1995) menempatkan penyediaan informasi sebagai tahapan awal partisipasi, yang jika tidak dilakukan dengan baik dapat menghambat transisi ke tingkat partisipasi yang lebih tinggi seperti konsultasi atau kolaborasi. Kurangnya keterbukaan informasi di Desa Kandui mengindikasikan perlunya reformasi dalam sistem komunikasi desa. Pemerintah desa perlu segera membangun kanal resmi seperti website desa dan akun media sosial yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Website

tersebut dapat memuat fitur real-time updates mengenai jadwal musyawarah, usulan pembangunan, status proyek, serta laporan keuangan desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi pembangunan juga perlu diperhatikan. Pelatihan literasi digital bagi aparat desa dan masyarakat umum dapat menjadi langkah awal untuk memastikan informasi yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh warga.

Peningkatan transparansi akan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Pada akhirnya, keterbukaan informasi menjadi fondasi untuk membangun budaya partisipasi yang lebih aktif, kritis, dan konstruktif di Desa Kandui.

d. Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Pelaksana

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan lembaga pelaksana (seperti Badan Permusyawaratan Desa/BPD) merupakan faktor krusial dalam memengaruhi partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan. Studi ini mengungkap bahwa meskipun tingkat transparansi informasi masih rendah, masyarakat Desa Kandui tetap menaruh kepercayaan pada Kepala Desa dan aparat pemerintah lokal. Hal ini terbukti dari antusiasme mereka dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada September 2024, meskipun keterbukaan anggaran belum optimal. Hal ini seperti hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat :

"Kami masih percaya pada Kepala Desa karena program-programnya sudah terbukti. Meskipun informasi anggaran tidak selalu jelas, kami melihat langsung pembangunan jalan dan posyandu yang sudah selesai. Itu membuat kami yakin bahwa pemerintah desa bekerja" (Hasil Wawancara, 2024).

Selain itu, Ketua BPD Kandui juga menguatkan temuan ini dengan pernyataan:

"Kepala Desa sering mengadakan pertemuan informal di rumahnya untuk mendengar keluhan warga. Hal ini membuat masyarakat merasa diperhatikan. Meskipun transparansi anggaran masih perlu ditingkatkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetap tinggi karena ada komitmen nyata dalam melayani masyarakat" (Hasil Wawancara, 2024).

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat di Desa Kandui lebih banyak didasarkan pada kehadiran fisik pemimpin serta evidensi nyata hasil pembangunan di lapangan. Warga cenderung mengaitkan kepercayaan dengan apa yang mereka lihat dan rasakan secara langsung, bukan semata-mata pada prosedur formal seperti laporan keuangan atau dokumen perencanaan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Mansuri dan Rao (2013), yang menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal seringkali berakar pada efektivitas persepsional (perceived effectiveness) program pembangunan, dibandingkan dengan transparansi administratif. Keberhasilan program nyata di lapangan mampu menutupi kekurangan dalam aspek formal transparansi informasi.

Selain itu, praktik pertemuan informal antara Kepala Desa dan warga sebagaimana dijelaskan Ketua BPD memperkuat teori social capital dari Putnam

(2000). Menurut Putnam, interaksi informal dan hubungan sosial yang kuat antara pemimpin dan warga dapat meningkatkan kepercayaan sosial dan memperkuat kohesi komunitas. Namun, perlu dicatat bahwa bentuk kepercayaan ini bersifat kontekstual dan personalistik. Masyarakat lebih mempercayai individu (Kepala Desa) daripada institusi formal (BPD). Hal ini bisa menjadi tantangan dalam jangka panjang, sebagaimana dicatat oleh Putnam, karena ketergantungan pada figur sentral dapat menghambat akuntabilitas kelembagaan dan berpotensi melemahkan tata kelola desa yang berbasis aturan. Kepercayaan yang tinggi terhadap Kepala Desa di Desa Kandui merupakan modal sosial yang penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, kepercayaan ini perlu diarahkan menjadi kepercayaan terhadap institusi formal seperti BPD dan pemerintah desa secara keseluruhan.

Pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas lembaga-lembaga desa, memperbaiki mekanisme transparansi informasi, serta secara bertahap membangun budaya akuntabilitas formal. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada figur tertentu, tetapi pada sistem pemerintahan desa itu sendiri. Strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan peran BPD dalam pengawasan pembangunan, sosialisasi rutin terkait penggunaan anggaran desa, serta membangun media komunikasi resmi seperti website desa untuk publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan secara berkala.

e. Budaya dan Nilai Sosial

Budaya dan nilai-nilai sosial masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Kandui. Di Desa Kandui ada lembaga adat yang menjaga pelaksanaan adat-istiadat di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan gotong-royong dalam kegiatan adat istiadat serta musyawarah mufakat dalam pemecahan masalah di dalam kehidupan bermasyarakat mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Desa Kandui memiliki lembaga adat yang dipimpin oleh Damang, Damang adalah gelar bagi seorang tokoh adat yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Damang berfungsi sebagai pemimpin adat yang bertugas menjaga dan melestarikan budaya serta hukum adat. Peran Damang sangat dihormati dalam masyarakat Dayak, karena mereka adalah penjaga tradisi, penengah dalam konflik, dan pelindung nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Budaya gotong-royong dan peran Damang sebagai pemimpin adat menjadi faktor pendukung. Wawancara dengan seorang *Damang* mengungkapkan:

"Kami selalu mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat karena itu bagian dari budaya kita. Yang tua dan muda harus bersama dalam memutuskan masa depan desa" (Hasil Wawancara, 2024).

Pernyataan ini mencerminkan kuatnya nilai kolektivisme dalam masyarakat Kandui, di mana keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, melibatkan berbagai generasi dan golongan dalam komunitas. Partisipasi dalam musyawarah

desa tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari penghormatan terhadap tradisi dan identitas kolektif masyarakat.

Temuan ini mendukung teori Cornwall (2008) tentang pentingnya budaya dalam membentuk pola partisipasi masyarakat. Menurut Cornwall, nilai-nilai kolektivisme yang kuat meningkatkan efektivitas musyawarah, karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil. Dalam konteks Desa Kandui, budaya gotong-royong dan penghormatan terhadap pemimpin adat seperti Damang telah menjadi mekanisme sosial yang memperkuat partisipasi. Ketika masyarakat terbiasa bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung lebih mudah beradaptasi dengan mekanisme partisipatif dalam perencanaan pembangunan formal.

Budaya gotong-royong juga berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kohesi masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Putnam (2000), di mana hubungan sosial yang erat mempercepat kolaborasi dalam pembangunan komunitas. Budaya lokal yang mendukung partisipasi perlu dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian integral dari strategi pembangunan desa. Pemerintah desa dapat mengadopsi pendekatan berbasis budaya, seperti mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam mekanisme perencanaan pembangunan, menyelenggarakan musyawarah di balai adat, dan melibatkan Damang secara formal dalam forum perencanaan.

Selain itu, program pembangunan desa sebaiknya memperhatikan kearifan lokal untuk meningkatkan legitimasi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan. Misalnya, proyek infrastruktur dapat dikombinasikan dengan ritual adat tertentu untuk memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Penguatan budaya gotong-royong dan nilai-nilai musyawarah tidak hanya mendorong partisipasi yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan efektivitas pembangunan desa secara keseluruhan.

f. Kepemimpinan yang Mendukung Pemimpin lokal

Dari wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa karena kesibukan Kepala Desa mengakibatkan kepala desa kurang berbaur dengan masyarakatnya. Namun kepala desa disela-sela kesibukannya masih memberikan pelayanan kepada masyarakat walau di luar jam kerja di rumahnya.

Kepemimpinan Kepala Desa juga berpengaruh. Wawancara dengan Ketua BPD menunjukkan bahwa meskipun Kepala Desa sibuk, ia tetap memberikan pelayanan di luar jam kerja:

"Beliau sering menerima kunjungan warga di rumahnya untuk membahas masalah desa. Ini membuat masyarakat tetap percaya pada pemerintah desa" (Hasil Wawancara, 2024).

Kehadiran fisik dan keterbukaan Kepala Desa dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat berperan besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Warga merasa lebih diperhatikan dan dihargai ketika pemimpin mereka bersedia mendengar langsung keluhan dan aspirasi mereka dalam suasana yang informal dan akrab.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ginting (2020) yang menekankan bahwa kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ginting menyatakan bahwa keberhasilan pemimpin lokal dalam mendorong partisipasi masyarakat sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk membangun hubungan personal, menciptakan rasa aman, dan menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan warga.

Dalam kerangka teori social capital dari Putnam (2000), hubungan yang kuat antara pemimpin dan masyarakat membangun kepercayaan dan memperkuat jaringan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepemimpinan yang responsif dan akrab dengan warga juga mempercepat arus informasi informal, memfasilitasi diskusi mengenai kebutuhan pembangunan, dan memungkinkan warga untuk lebih proaktif dalam mengajukan aspirasi.

Model kepemimpinan di Desa Kandui menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pemimpin dengan masyarakat menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi. Namun, pendekatan ini perlu ditingkatkan dengan sistematisasi forum-forum informal menjadi mekanisme resmi seperti forum aspirasi warga berkala.

Pemerintah desa dapat mengadopsi strategi pelibatan berbasis komunitas, seperti membuka "jam audiensi masyarakat" yang terjadwal secara rutin, memperluas penggunaan media komunikasi daring untuk mempercepat respon terhadap keluhan warga, serta memperkuat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan memadukan pendekatan personalistik dan institusional, kepemimpinan desa dapat lebih efektif mendorong partisipasi masyarakat secara luas, berkelanjutan, dan berbasis kepercayaan.

g. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kandui menjadi salah satu faktor penentu utama dalam partisipasi mereka terhadap perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan data lapangan, mayoritas penduduk Desa Kandui berada pada kelompok usia di atas 40 tahun, dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan.

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat, kurang memahami prosedur perencanaan, serta mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan informasi pembangunan. Rendahnya tingkat literasi ini membatasi kemampuan masyarakat untuk terlibat secara kritis dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Namun, terdapat optimisme terhadap generasi muda di bawah usia 40 tahun yang sebagian besar telah menempuh pendidikan lebih tinggi. Generasi ini

diharapkan mampu mendorong transformasi pola partisipasi di masa mendatang. Wawancara dengan salah satu pemuda desa Kandui (28 tahun) mengungkapkan:

"Saya merasa perlu lebih banyak orang muda terlibat dalam perencanaan. Kami lebih paham tentang teknologi dan bisa membantu masyarakat lain dalam mengakses informasi" (Hasil Wawancara, 2024).

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran generasi muda akan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, serta kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pemberdayaan komunitas.

Temuan ini sejalan dengan teori "ladder of citizen participation" yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), yang menekankan bahwa pendidikan meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang mereka untuk naik ke tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dari sekadar penerima informasi menjadi aktor aktif dalam menentukan arah pembangunan. Selain itu, menurut Putnam (2000), pendidikan berkontribusi pada peningkatan social capital, di mana masyarakat yang terdidik lebih mampu membangun jaringan, memperkuat kepercayaan sosial, dan mendorong kolaborasi dalam pembangunan komunitas.

Penting bagi pemerintah desa untuk mengembangkan strategi yang fokus pada pemberdayaan pendidikan, baik bagi generasi tua maupun muda. Program pendidikan nonformal, seperti pelatihan literasi digital, lokakarya perencanaan partisipatif, dan diskusi publik, dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Khusus untuk generasi muda, perlu diciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif, seperti forum pemuda desa atau komunitas inovasi desa, yang dapat menjadi motor penggerak perubahan pola partisipasi masyarakat. Generasi muda dapat menjadi agen transformasi yang menjembatani kesenjangan literasi antara generasi tua dan perkembangan teknologi.

h. Persepsi Terhadap Manfaat Pembangunan

Persepsi masyarakat terhadap manfaat pembangunan berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif mereka dalam perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Desa Kandui, ditemukan bahwa masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten, dalam menyerap usulan-usulan masyarakat, meskipun keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan dapat segera direalisasikan.

Informan menyampaikan bahwa pengalaman positif terhadap hasil pembangunan, baik di bidang fisik seperti infrastruktur jalan dan posyandu maupun di bidang nonfisik seperti program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan motivasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam perencanaan pembangunan ke depan::

"Kami senang karena pembangunan jalan dan posyandu sudah terlaksana. Ini membuat masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi di tahun berikutnya" (Hasil Wawancara, 2024).

Pengalaman nyata terhadap keberhasilan proyek-proyek pembangunan memberikan rasa percaya diri dan keyakinan kepada masyarakat bahwa partisipasi mereka berkontribusi pada perubahan yang nyata. Perasaan ini mendorong siklus positif di mana partisipasi masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Temuan ini selaras dengan penelitian Meka & Mellita (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan proyek pembangunan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses partisipatif. Ketika masyarakat melihat bahwa aspirasi mereka diakomodasi dan menghasilkan perubahan konkret, mereka cenderung lebih bersemangat untuk terlibat dalam siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan berikutnya. Dalam perspektif teori partisipasi, persepsi positif terhadap hasil pembangunan memperkuat "sense of ownership" masyarakat terhadap proyek pembangunan (Pretty, 1995). Dengan demikian, pengalaman empiris yang positif memperkuat komitmen warga terhadap pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, teori social capital dari Putnam (2000) juga relevan di sini, karena menunjukkan bahwa keberhasilan kolektif membangun kepercayaan sosial, yang menjadi fondasi bagi partisipasi komunitas yang lebih luas dan berkelanjutan. Penting bagi pemerintah desa untuk terus membangun persepsi positif masyarakat terhadap pembangunan dengan memastikan adanya kesinambungan proyek-proyek yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Transparansi dalam menyampaikan progres proyek, keberhasilan kecil yang diakui dan dirayakan bersama, serta keterlibatan masyarakat dalam monitoring proyek dapat memperkuat persepsi positif ini.

Di sisi lain, pemerintah desa juga harus mengelola ekspektasi masyarakat secara realistis, dengan menjelaskan keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, agar masyarakat memahami bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Dengan pengelolaan ekspektasi yang baik, kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga bahkan ketika ada keterbatasan dalam pelaksanaan program. Pengalaman nyata terhadap keberhasilan proyek-proyek pembangunan memberikan rasa percaya diri dan keyakinan kepada masyarakat bahwa partisipasi mereka berkontribusi pada perubahan yang nyata. Perasaan ini mendorong siklus positif di mana partisipasi masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Temuan ini selaras dengan penelitian Meka & Mellita (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan proyek pembangunan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses partisipatif. Ketika masyarakat melihat bahwa aspirasi mereka diakomodasi dan menghasilkan perubahan konkret, mereka cenderung lebih bersemangat untuk terlibat dalam siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan berikutnya.

Dalam perspektif teori partisipasi, persepsi positif terhadap hasil pembangunan memperkuat "sense of ownership" masyarakat terhadap proyek pembangunan (Pretty, 1995). Dengan demikian, pengalaman empiris yang positif

memperkuat komitmen warga terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, teori social capital dari Putnam (2000) juga relevan di sini, karena menunjukkan bahwa keberhasilan kolektif membangun kepercayaan sosial, yang menjadi fondasi bagi partisipasi komunitas yang lebih luas dan berkelanjutan.

Penting bagi pemerintah desa untuk terus membangun persepsi positif masyarakat terhadap pembangunan dengan memastikan adanya kesinambungan proyek-proyek yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Transparansi dalam menyampaikan progres proyek, keberhasilan kecil yang diakui dan dirayakan bersama, serta keterlibatan masyarakat dalam monitoring proyek dapat memperkuat persepsi positif ini.

Di sisi lain, pemerintah desa juga harus mengelola ekspektasi masyarakat secara realistis, dengan menjelaskan keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, agar masyarakat memahami bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Dengan pengelolaan ekspektasi yang baik, kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga bahkan ketika ada keterbatasan dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan dalam konteks partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, penelitian yang dilakukan di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah terlaksana dengan baik setiap tahunnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pembangunan desa (Cornwall, 2008; Pretty, 1995). Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan kemajuan dalam partisipasi masyarakat, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas partisipasi tersebut, seperti rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan masyarakat (Suharto, 2019). Partisipasi masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Ginting (2020), partisipasi masyarakat yang aktif dapat mengarah pada perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Arnstein (1969) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat harus dilihat sebagai suatu spektrum, di mana tingkat partisipasi yang lebih tinggi memberikan masyarakat lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi yang optimal, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Penelitian oleh Putnam (2000) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik dan sosial. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan.

Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari World Bank (2006) yang menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi. Lebih lanjut, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat harus diatasi. Penelitian oleh Mansuri dan Rao (2013) menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dapat meningkatkan hasil pembangunan, faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kurangnya akses informasi dapat menghambat partisipasi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai partisipasi yang lebih efektif dan inklusif. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas partisipasi dalam konteks pembangunan desa.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, telah berjalan dengan baik melalui forum musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masih terbatas pada tahap pengambilan keputusan dan belum mencapai tahap implementasi atau evaluasi secara efektif. Faktor pendukung partisipasi antara lain kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, budaya gotong-royong, dan peran lembaga adat seperti Damang. Namun, faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan akses informasi yang terbatas (tidak adanya website desa atau media sosial resmi) menjadi kendala utama.

Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi, pemerintah desa harus mengembangkan program pendidikan literasi digital dan keuangan bagi masyarakat, terutama kelompok usia muda yang memiliki potensi meningkatkan kapasitas partisipasi di masa depan. Kecamatan Gunung Timang perlu memfasilitasi pelatihan kepemimpinan bagi tokoh masyarakat, seperti Damang, untuk meningkatkan motivasi partisipasi. Selain itu, Diskominfo Kabupaten Barito Utara harus mendukung pembuatan website resmi desa dengan fitur pengumuman rencana pembangunan dan forum diskusi online. Pemerintah desa juga dianjurkan untuk menggunakan media sosial resmi untuk menyebarkan informasi tentang jadwal rapat dan hasil musyawarah.

Penelitian ini terbatas pada Desa Kandui dengan metode kualitatif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke desa lain. Penelitian masa depan disarankan untuk menggunakan metode mixed-methods untuk mengkombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif, membandingkan tingkat partisipasi antar desa di Kabupaten Barito Utara, dan menilai dampak program pendidikan (sebelum dan sesudah) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan analisis statistik.

Referensi

- Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Achadiat, K., David, A., Syukri, M., Purnama, G., & Paskarina, C. (2024). Pengaruh Keberagaman Terhadap Pengambilan Keputusan: Studi Kasus Pemerintah Desa Ngadas. *Unes Law Review*, 6(3), 8123-8134. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1687>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings, and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283.
- Dewi, Fandeli & Baiquni. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Junal Kawistara*, 3/2, 129-139. <https://journal.ugm.ac.id/index.php/kawistara/article/download/3976/3251>
- Dini, A. and Firdaus, M. (2024). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(2), 1844-1859. <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1121>
- Dwiningrum, S.I.A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45-60.
- Hariyoko, Y. (2022). Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 209-218. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.264>
- Hendrawati, E. dan Pramudianti M. (2020). Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa. *Junal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12/2, 100-108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Junal Ilmiah Administrasita*, 13/1, 1-13. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341>
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179-188.

- <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Kuniawan, R., Mardoni, A. dan Murahman, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. *PASira: Journal Of Public Administration Musi Raya*, 5/1, 31-37.
- Lestari, S. and Wahyuningsih, Y. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(10), 1254-1261. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i10.235>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank Policy Research Report.
- Marlita, V. and Widodo, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1200>
- Meka, P.S. & Mellita, D. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lebu Rarak Kecamatan Padamaran. *Jurnal Mirai Management*, 7/2, 65-71. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2268>
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Penj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Modanggu, I., Kuuna, W., Pambudi, M., & Eraku, S. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Wilayah: Studi Kasus di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila. *JGS*, 1(2), 79-84. <https://doi.org/10.69606/geography.v1i2.72>
- Pamungkas, N. (2021). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Pedesaan melalui Pendidikan Anak Usia Dini. *Sentra Cendekia*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.31331/sencenivet.v2i1.1619>
- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Satriani, Indra, et al., (2022). Participatory budgeting di desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. Vol. 3, No. 2, 574-584
- Setiadi, Hafid. (2014). *Teori Perencanaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Siagian, Sondang P. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi ke-2. Cetakan ke 29. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, A. (2019). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 123-134.
- Walean, T., Mantiri, M.S. & Pati, A.B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 2/1, 1-9.
- Wasdi, W. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia di Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(2), 223-237. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.524>
- World Bank. (2006). *World development report 2006: Equity and development*. World Bank Publications.